

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemajuan teknologi serta adanya fenomena perubahan iklim membawa perubahan dalam berbagai segi kehidupan, terutama dalam sektor ekonomi. Menurut hasil laporan *South East Asia's Green Economy report* tahun 2023, negara asia tenggara menjadi rumpun negara yang berkontribusi terhadap gas emisi karbon, diantaranya menempati posisi keempat sebagai negara dengan pemakai energi terbesar di dunia, mendapatkan 80% energi dari hasil energi fosil serta menjadi kontributor emisi global dalam penggunaan perubahan tanah dan penebangan hutan (Hardcastle et al., 2023).

Bukanlah suatu hal yang mudah untuk mewujudkan transmisi energi terbarukan serta pencapaian untuk *net zero emission*, hal ini dikarenakan negara-negara di ASEAN menghadapi tantangan tersendiri diantaranya; masih terdapat ketergantungan terhadap bahan bakar fosil (yaitu negara Indonesia, Brunei, Malaysia dan Filipina); adanya perbedaan tingkat dalam pengembangan ekonomi di setiap negara ASEAN, terdapat tekanan atas pertumbuhan ekonomi serta usaha untuk dekarbonisasi, koneksi yang cukup kompleks bagi negara kepulauan seperti Indonesia, terdapat lapangan kerja yang cukup besar dalam pengoperasian bahan bakar fosil (di Indonesia terdapat 250 ribu pekerja dalam tambang batu bara; kemudian di Malaysia terdapat 35 ribu pekerja lebih yang bekerja di sektor petroleum dan gas alam); serta masih

adanya ketidakmerataan dalam melakukan distribusi energi terbarukan (seperti di negara Singapura dan Brunei berpotensi akan melakukan impor atas energi terbarukan) (Hardcastle et al., 2023).

Menyadari bahwa permasalahan gas emisi rumah kaca semakin serius dan mengancam kesejahteraan manusia beserta negara, maka dari itu *United Nations* selaku *benchmark* antar negara-negara di dunia dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik menginisiasi adanya Perjanjian Paris yang disahkan pada 12 Desember 2015 di Paris dan ditandatangani oleh 195 Negara, Indonesia sendiri sudah tergabung sejak tahun 2016 (*United Nations Treaty Collection*, n.d.). Dalam perjanjian Paris ditetapkan bahwa adanya komitmen antara negara-negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, untuk menjaga kenaikan suhu global jauh di bawah 2⁰C diatas tingkat pra-industri dan mengupayakan untuk mengatasi suhu global di angka 1,5⁰c. Kemudian menilai secara periodik terkait kemajuan atas pencapaian dari perjanjian paris dan tujuan jangka panjang, serta menyediakan kebutuhan finansial untuk negara berkembang dalam rangka melakukan menanggulangi perubahan iklim, memperkuat ketahanan dan meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi terhadap dampak terjadinya perubahan iklim. Dengan adanya Perjanjian Paris ini diharapkan setiap lima tahun, semua negara diwajibkan untuk menyerahkan laporan terkait rencana aksi dalam rangka mengatasi perubahan iklim yang disebut dengan *Nationally Determined Contribution* (NDC) (*Nationally Determined Contributions (NDCs) | UNFCCC*, n.d.). Terlebih dahulu sebelum adanya Perjanjian Paris, sudah ada Protokol Tokyo yang disahkan pada tahun

1997, dimana dalam Protokol Tokyo mewajibkan untuk negara-negara industri menurunkan kadar emisinya sebesar 5,2%. Dalam proses implementasi Protokol Tokyo terdapat beberapa kegiatan yang bertujuan untuk melakukan penurunan emisi gas rumah kaca diantaranya yaitu *Joint Implementation*, *Emission Trading* serta *Clean Development Mechanism* (CDM) (LindungiHutan, 2022).

Dalam rangka mendukung capaian *net zero emission* yang tertera dalam NDC dan juga mewujudkan komitmen dalam perjanjian paris, *Asian Capital Market Forum* (ACMF) membuat *Action Plan* 2021-2025 sebagai lanjutan dari *Action Plan* 2016-2020. Pada *Action Plan* 2021-2025 terdapat lima prioritas utama untuk dijalankan, diantaranya adalah meningkatkan tingkat transparansi dan pengungkapan. Tujuan adanya peningkatan transparansi dan pengungkapan adalah membantu menarik perhatian investor untuk menanamkan modal. Untuk merealisasikan tujuan ini, ACMF merencanakan beberapa strategi yaitu bekerja sama dengan bursa efek se-ASEAN untuk meningkatkan kualitas dan daya saing perusahaan dalam melakukan pengungkapan keberlanjutan, mengembangkan jalan untuk taksonomi keuangan se-ASEAN, bekerja sama dengan asosiasi investor terkait elemen keberlanjutan, pengembangan standar untuk *Green Bonds* se-ASEAN, dan berkonsultasi dengan menajaer keuangan di negara-negara ASEAN dalam rangka penerbitan pinjaman dana berkelanjutan dan standar yang bertanggung jawab (ACMF, 2021).

Melakukan pengungkapan emisi karbon dalam bentuk pelaporan yang masih bersifat sukarela, hal ini dikarenakan belum adanya aturan baku serta kebijakan yang bersifat mewajibkan setiap entitas perusahaan untuk melakukan pelaporan emisi karbon seperti melakukan pelaporan keuangan. Dalam akuntansi, pelaporan keuangan membutuhkan suatu standar baku serta aturan yang mengatur terkait penjurnalan maupun aturan pengakuan transaksi. Sama seperti konsep pelaporan akuntansi, pelaporan emisi karbon memerlukan aturan-aturan yang bertujuan untuk mengintegrasikan sistem pelaporan emisi karbon. Terkait dengan pelaporan emisi karbon, konsep *green accounting* bisa menjadi pilihan dalam melakukan pelaporan. *Green accounting* merupakan suatu konsep akuntansi yang menambahkan biaya-biaya untuk kelestarian lingkungan. Akuntansi karbon bisa menjadi salah satu metode untuk menjadi basis dalam mengungkapkan emisi karbon, hal ini dikarenakan akuntansi karbon menurut (Rosaline *et al*, 2020 dalam (Lestari & Murtanto, 2025) mencakup beberapa biaya yang terkait dengan lingkungan yaitu biaya lingkungan, daur ulang limbah dan penelitian serta pengembangan lingkungan. Adanya penerapan sistematisan akuntansi hijau sebagai landasan pembuatan laporan pengungkapan emisi karbon akan membantu pihak eksternal untuk memahami apakah perusahaan sudah berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan atau sebaliknya.

Menindaklanjuti terkait pengungkapan emisi karbon kepada publik, negara Indonesia dalam pembuatan laporan terkait Nilai Ekonomi Karbon bisa menggunakan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 sebagai pedoman

kerangka laporan. Dalam Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 pasal 66 hal yang harus termuat dalam laporan Nilai Ekonomi Karbon diantaranya perhitungan besaran *baseline* emisi GRK, pemilihan periode referensi *baseline* emisi GRK, asumsi dalam menyusun *baseline* emisi GRK, perhitungan batas atas emisi GRK, metodologi perhitungan capaian aksi mitigasi perubahan iklim, hasil pemantauan, aksi mitigasi yang dilakukan, beaan capaian target dan uraian sistem manajerial (Perpres No.98 2021, 2021).

Dalam penerapan pelaporan emisi karbon di Indonesia, PT Bukit Asam menjadi salah satu contoh perusahaan sektor energi yang mengimplementasikan pelaporan emisi karbon. Dalam laporan keberlanjutan PT Bukit Asam tahun 2023 dipaparkan terkait emisi karbon yang dikeluarkan selama satu periode, diberitahukan terkait jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan serta biaya lingkungan yang dikeluarkan untuk kebutuhan kelestarian lingkungan. Selain itu, PT Bukit Asam menerapkan beberapa strategi untuk mendukung capaian *Net Zero Emission*, diantaranya dengan melakukan rekalamasi, transisi teknologi hijau dan menerapkan *E-Mining Reporting System* (Jakarta 10.1.0.5, n.d.). komitmen PT Bukit Asam dalam menerbitkan laporan keberlanjutan dimulai sejak tahun 2007, hal ini ditunjukkan sebagai bentuk komitmen PT Bukit Asam untuk tetap memerhatikan keberlanjutan lingkungan dalam pengoperasian bisnis. Kemudian penerbitan laporan keberlanjutan secara konsisten merupakan wujud nyata dalam mememenuhi aturan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas dan POJK No. 51/POJK.03/2017 terkait penyampaian laporan keberlanjutan. Atas

hasil konsisten penerbitan laporan keberlanjutan sejak 2007, PT Bukit Asam diberikan penghargaan peringkat PROPER Kategori Emas pada tahun 2020 (*Bukit Asam Konsisten Sajikan Laporan Keberlanjutan Berstandar GRI, n.d.*).

Menindaklanjuti langkah menuju *net zero emission*, Indonesia melakukan mobilisasi pendanaan dari hasil kerjasama dengan pihak internasional menyetujui sebesar 20 miliar dolar amerika serikat yang dibagi untuk pendanaan publik dan nonpublik dalam rangka mewujudkan akselerasi indonesia dalam mencapai *net zero emission*, hal ini disetujui pada tahun 2022 oleh Bapak Presiden Joko Widodo dalam pertemuan G20 di Bali. Dengan adanya bantuan pendanaan ini, Indonesia optimis untuk mencapai 34% dalam energi terbarukan dalam pembangkit listrik pada tahun 2030 serta mencapai target *net zero emission* pada tahun 2050 (Fallin et al., n.d.,2023). Selain itu, strategi yang diterapkan Indonesia dalam mewujudkan *Net Zero Emission* adalah sebagai berikut, dalam sektor energi terdapat beberapa aksi mitigasi seperti misalnya pada efisiensi energi yaitu adanya memperkuat kewajiban manajemen energi hal ini kemudian direalisasikan apabila bisnis dilakukan seperti biasa penyimpanan minyak di 2010 akan tersisa secara konstan sampai tahun 2023. Namun jika ada terdapat upaya pengurangan emisi karbon tanpa bantuan pendanaan dari luar negeri maka minyak yang tersimpan akan mencapai 70 juta BOE. Untuk di sektor agrikultur salah satu aksi mitigasi berupa adanya penggunaan tanaman dengan emisi rendah, dimana jika terdapat upaya pengurangan emisi karbon tanpa pendanaan luar negeri, jumlah kegunaan tanah untuk tanaman rendah emisi mencapai 902.000 hektar di tahun

20230. Apabila terdapat bantuan pendanaan dari luar negeri maka total tanah yang akan digunakan untuk tanaman rendah emisi mencapai 932.000 hektar di tahun 2030 (NDC Republic of Indonesia, 2022).

Menurut laporan dari *Climate Change Performance Index* tahun 2024, Indonesia menempati peringkat ke-42 dengan meraih rating rendah dalam hal emis gas rumah kaca, pemakaian energi dan kebijakan iklim, kemudian meraih peringkat menengah dalam energi terbarukan. Berdasarkan rating yang didapatkan oleh negara Indonesia menandakan bahwa kinerja negara belum secara signifikan menunjukkan progresnya dalam menurunkan emisi karbon. Hal ini didasarkan pada kinerja negara Indonesia yang belum maksimal dalam pengurangan emisi gas rumah kaca, pemakaian energi serta kebijakan iklim.

Berdasarkan penggolongan tipe industri, terdapat pembagiannya menjadi dua yaitu industri dengan profil tinggi dan industri dengan profil rendah. Industri dengan profil tinggi cenderung mendapatkan perhatian serta pengawasan yang lebih dari pihak eksternal. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan profil tinggi intensitas operasional bisnisnya cenderung bersinggungan langsung dengan alam dan berpotensi untuk berhubungan dengan masyarakat luas. Adanya pengkategorian industri dapat membantu perusahaan dalam pengkategorian jumlah emisi karbon yang dihasilkan, perusahaan yang tergolong dalam kategori intensi akan cenderung lebih banyak menghasilkan emisi karbon dibandingkan dengan perusahaan yang tergolong dalam kategori non-intensif (P. Ramadhani & Venusita, 2020). Menurut hasil penelitian terdahulu dari (Tana, 2021) menyatakan bahwa tipe industri memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon, kemudian penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari (Putri & Hermi, 2024) yang juga menyimpulkan bahwa tipe industri memiliki dampak positif terhadap pengungkapan emisi karbon.

Green Investment atau investasi hijau merupakan sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan tujuan untuk merawat serta melestarikan lingkungan di sekitar tempat perusahaan beroperasi (Agatha et al., 2024). Apabila perusahaan menerapkan kebijakan *green investment* sebagai salah satu strategi keberlanjutan, maka dapat diyakini bahwa strategi ini akan meningkatkan reputasi perusahaan di kalangan investor. Hal ini dikarenakan investor memiliki kepercayaan bahwa perusahaan sudah menjalankan kontribusi sosial bagik kepada masyarakat maupun kepada lingkungan (Novia & Candy, 2023). Menurut hasil penelitian terdahulu dari (Yesiani & Sari, 2023) menyimpulkan bahwa *green investment* memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon. Akan tetapi hasil penelitian ini memiliki kontradiksi dengan hasil penelitian dari (Loru, 2023) yang menyimpulkan bahwa tipe industri memiliki dampak positif terhadap pengungkapan emisi karbon

Dalam mengukur rasio profitabilitas, dapat menggunakan perhitungan *Return on Asset (ROA)* dan *Net Profit Margin (NPM)*. *Return on Asset (ROA)* merupakan perhitungan yang bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif perusahaan menghasilkan laba dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan (A. R. Y. Pratama & Prapanca, 2024). Pada saat

perusahaan menerima pengembalian atas aset dengan nominal yang tinggi maka akan semakin tinggi laba bersih yang akan diterima begitupun sebaliknya (Herry, 2014:193 dalam (Wijaya, 2019)). *Net Profit Margin* (NPM) merupakan indikator untuk melihat laba bersih atas penjualan yang sudah dikurangi dengan harga pokok penjualan. Adanya *Net Profit Margin* bisa menjadi tolak ukur perusahaan dalam mengatur biaya operasional untuk memaksimalkan hasil penjualan dan laba yang ditargetkan (Nugraha & Susyana, 2021). Menurut hasil penelitian penelitian terdahulu dari (Cecilia Rooschella & Virna Sulfitri, 2023) menyimpulkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Akan tetapi penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian (Claudia & Halik, 2024) yang menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Seiring dengan berjalannya waktu, proses bisnis yang dijalankan oleh setiap perusahaan akan membawa dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif yang akan hadir adalah adanya usaha keberlanjutan dan menguntungkan bagi perusahaan maupun bagi pihak eksternal. Namun untuk dampak negatifnya perusahaan berpotensi gulung tikar dan tidak mampu melunasi liabilitasnya. Dengan adanya pertumbuhan dapat menjadi tolak ukur perusahaan untuk menilai seberapa jauh perusahaan telah berkarya dan menempatkan diri dalam sistem ekonomi untuk bersaing dengan industri lain (Amelia & Anhar, 2019). Menurut hasil penelitian terdahulu yaitu (Widiyani & Meidawati, 2023) menyatakan bahwa

pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon

Media Exposure merupakan suatu kegiatan untuk mendengar, melihat dan membaca informasi yang disajikan oleh entitas maupun perorangan (Septriyawati & Anisah, 2019). Adanya perkembangan teknologi serta sumber daya yang cukup, dapat menjadi *tools* bagi perusahaan untuk melakukan komunikasi dengan pihak eksternal mengenai performa perusahaan serta kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan (Ningsih et al., 2021a). Menurut hasil penelitian terdahulu dari (Loru, 2023) menyimpulkan bahwa media exposure memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Akan tetapi hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian dari (Putri & Hermi, 2024) yang menyatakan bahwa *media exposure* tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Adanya pembagian kerja yang jelas serta struktur organisasi yang detail diharapkan mampu menjadi penopang pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. tujuan diberlakukannya tata kelola perusahaan yang baik di setiap entitas adalah untuk mewujudkan keserasian dalam berkolaborasi, menciptakan hubungan harmonis antara pihak perusahaan dengan pemangku kepentingan, serta menciptakan nilai tambah bagi perusahaan (Widagdo & Chariri, 2014). Menurut hasil penelitian terdahulu dari (Cecilia Rooschella & Virna Sulfitri, 2023) menyimpulkan bahwa tata kelola perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon. Hal ini bertolak belakang dengan pengajuan hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian

ini, yaitu tata kelola perusahaan dengan indikator board size memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.

Kepemilikan Institusional merupakan jumlah saham beredar perusahaan yang dimiliki oleh pihak eksternal. Adanya keterlibatan pihak eksternal dalam suatu perusahaan akan menambah fungsi pengawasan atas kegiatan operasional perusahaan (Mattiara et al., 2020a). Semakin tinggi kepemilikan saham institusional, maka semakin tinggi juga pengawasan eksternal yang akan didapatkan perusahaan dalam mengawasi tindakan manajemen dalam membuat keputusan serta perumusan kebijakan bagi operasional perusahaan (Rahayu & Rusliati, 2019). Menurut hasil penelitian penelitian terdahulu yaitu (Ramadhan et al., 2021) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional memiliki dampak positif terhadap pengungkapan emisi karbon.

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti melihat adanya gap penelitian mengenai variabel tipe industri, profitabilitas, *green investment*, pertumbuhan usaha, *media exposure*, *good corporate governance* dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan emisi karbon. Atas hal tersebut, peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengaruh Determinasi Pengungkapan Emisi Karbon : Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Energi Dan Agrikultur Di Indonesia Periode 2019-2023”**.

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang terkait pengungkapan emisi karbon, maka peneliti dapat mengambil beberapa rumusan masalah untuk diteliti lebih lanjut yaitu:

1. Apakah tipe industri memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon di Indonesia ?
2. Apakah *green investment* memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon di Indonesia ?
3. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon di Indonesia ?
4. Apakah pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon di Indonesia ?
5. Apakah *media exposure* memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon di Indonesia ?
6. Apakah *good corporate governance* memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon di Indonesia ?
7. Apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti melakukan penelitian atas beberapa rumusan masalah yang telah disebutkan, yaitu :

1. Melaksanakan penelitian serta menganalisis pengaruh tipe industri terhadap pengungkapan emisi karbon di Indonesia.

2. Melaksanakan penelitian serta menganalisis pengaruh *green investment* terhadap pengungkapan emisi karbon di Indonesia.
3. Melaksanakan penelitian serta menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan emisi karbon di Indonesia.
4. Melaksanakan penelitian serta menganalisis pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon di Indonesia.
5. Melaksanakan penelitian serta menganalisis pengaruh *media exposure* terhadap pengungkapan emisi karbon di Indonesia.
6. Melaksanakan penelitian serta menganalisis pengaruh *good corporate governance* terhadap pengungkapan emisi karbon di Indonesia.
7. Melaksanakan penelitian serta menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan emisi karbon di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

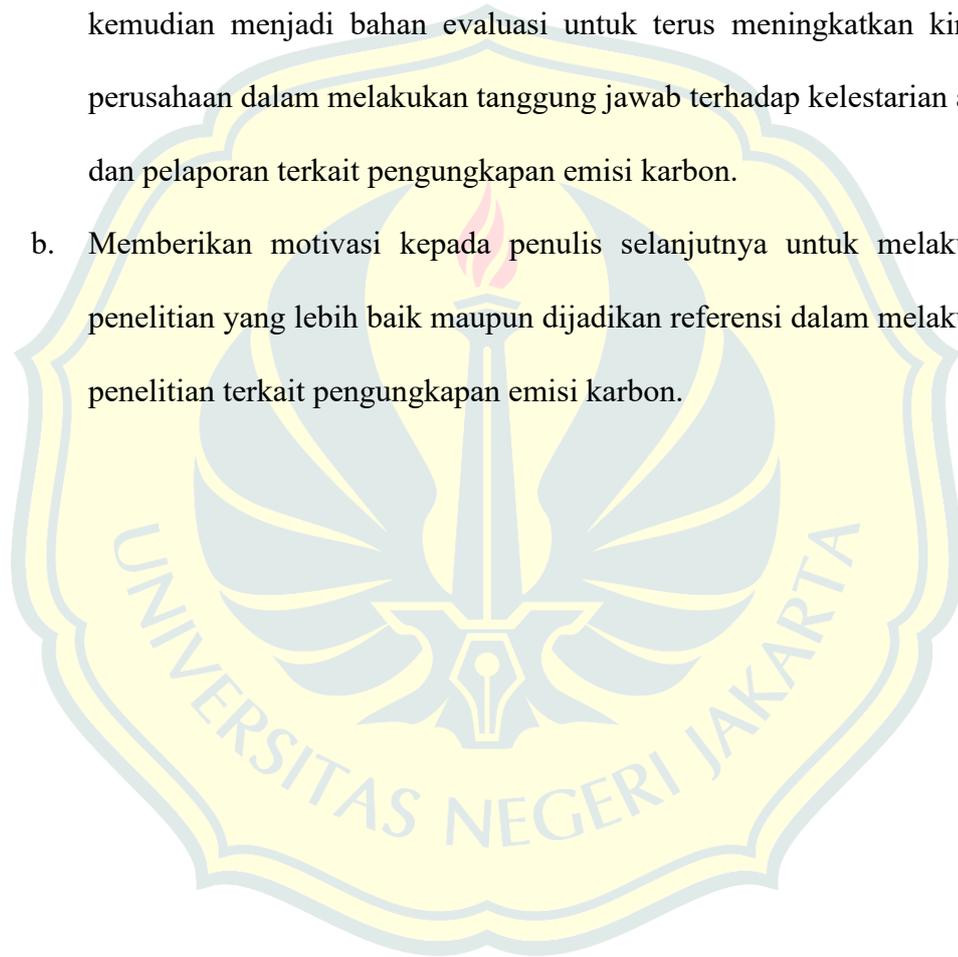
Adapun manfaat penelitian yang ingin diberikan peneliti kepada pembaca ialah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a) Menjadi bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi, khususnya pada bidang pengungkapan emisi karbon.
- b) Menjadi landasan pembuktian adanya gap penelitian yang terdapat pada penelitian-penelitian terdahulu terkait Pengungkapan Emisi Karbon.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Menjadi motivasi ataupun bahan evaluasi bagi perusahaan-perusahaan yang ada di sektor energi, agrikultur maupun sektor lainnya untuk terus mempertahankan komitmen dalam mencapai *Net Zero Emission*, kemudian menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan dalam melakukan tanggung jawab terhadap kelestarian alam dan pelaporan terkait pengungkapan emisi karbon.
- b. Memberikan motivasi kepada penulis selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih baik maupun dijadikan referensi dalam melakukan penelitian terkait pengungkapan emisi karbon.



Intelligentia - Dignitas